

**SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
BERKELANJUTAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN
SYSTEM OF SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLANNING ON
DISTRICT MEDIUM-TERM**

**Jojob Widodo Soetjipto¹, Retno Utami A. Wiyono¹, Paksitya Purnama Putra¹,
Rindang Alfiah²**

¹ Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember

² Program Studi Perencanaan Wilayah Kota Fakultas Teknik Universitas Jember

*Corresponding author's email: jojob.teknik@unej.ac.id

ABSTRACT

The provision of district infrastructure requires detailed planning in preparing programs and budgets to encourage the equitable distribution of human settlement infrastructure development. The government has issued guidelines for preparing the RPIJM to harmonize the development plan, spatial plan, and Strategic Development Area plan. However, many problems must be resolved and are not proportional to the APBD/APBN revenues; therefore, it is necessary to formulate an appropriate RPIJM to support sustainable development. In this study, the RPIJM preparation refers to (i) policy directions and infrastructure strategic plans as well as the region's existing conditions analysis; and (ii) the design of infrastructure development. The RPIJM preparation must be carried out prudently because it involves a large budget, program of the community essential activities in solving existing problems and in sustainable development, synchronized infrastructure development for local and national governments, and the risk of failure in the management of its implementation. The results of the RPIJM are a proposed plan for the financing of the human settlements development sector, which includes: (i) Residential Area Development; (ii) Building and Environmental Management; (iii) Development of Drinking Water Supply Systems; and (iv) development of residential environmental sanitation. Recommendations of the RPIJM are compiled in the memorandum of the medium term program in human settlements, which outlines scenarios for district development in the public work-human settlements sector, proposals for investment based on needs, achievement targets by regional development goals and objectives, mechanisms of funding, handling priority, and investment program implementation.

Keywords: RPIJM, sustainable development, development program, development funding

ABSTRAK

Penyediaan infrastruktur kabupaten/kota membutuhkan perencanaan yang detail dalam penyusunan program dan anggaran agar dapat mendorong proses pemerataan pembangunan infrastruktur PU/Cipta Karya yang lebih ideal, efektif dan efisien. Pemerintah sudah mengeluarkan pedoman dalam penyusunan RPIJM agar selaras antara rencana pembangunan, rencana tata ruang dan rencana Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Namun banyak permasalahan yang harus diselesaikan dan tidak sebanding dengan penerimaan APBD dan APBN suatu kabupaten/kota, oleh karena itu perlu disusun RPIJM yang tepat guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pada penelitian ini penyusunan RPIJM mengacu pada: (i) arah kebijakan dan rencana strategis infrastruktur serta analisis kondisi eksisting wilayah; dan (ii) rancangan pembangunan infrastruktur cipta karya. Penyusunan RPIJM harus dilakukan secara prudent karena menyangkut anggaran yang besar, program kegiatan yang sangat esensial bagi masyarakat baik dalam penyelesaian masalah maupun pengembangan wilayah yang berkelanjutan, memiliki misi untuk mensinkronisasi pembangunan infrastruktur pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan memiliki risiko kegagalan pada manajemen pelaksanaannya. Hasil rancangan RPIJM disusun dalam bentuk rencana usulan kebutuhan pembiayaan sektor pengembangan

infrastruktur cipta karya yang meliputi: (i) Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP); (ii) Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL); (iii) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan (iv) pengembangan penyehatan lingkungan permukiman (PLP). Rekomendasi hasil RPIJM disusun dalam bentuk memorandum program jangka menengah bidang cipta karya kabupaten/kota yang menjabarkan skenario pengembangan kabupaten dan pengembangan sektor bidang Cipta Karya, usulan investasi yang disusun dengan berbasis kebutuhan, target pencapaian sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, mekanisme pendanaan atau pembiayaan, skala prioritas penanganannya, dan rencana pelaksanaan program investasi.

Keywords: RPIJM, pembangunan berkelanjutan, program pembangunan, pembiayaan pembangunan

PENDAHULUAN

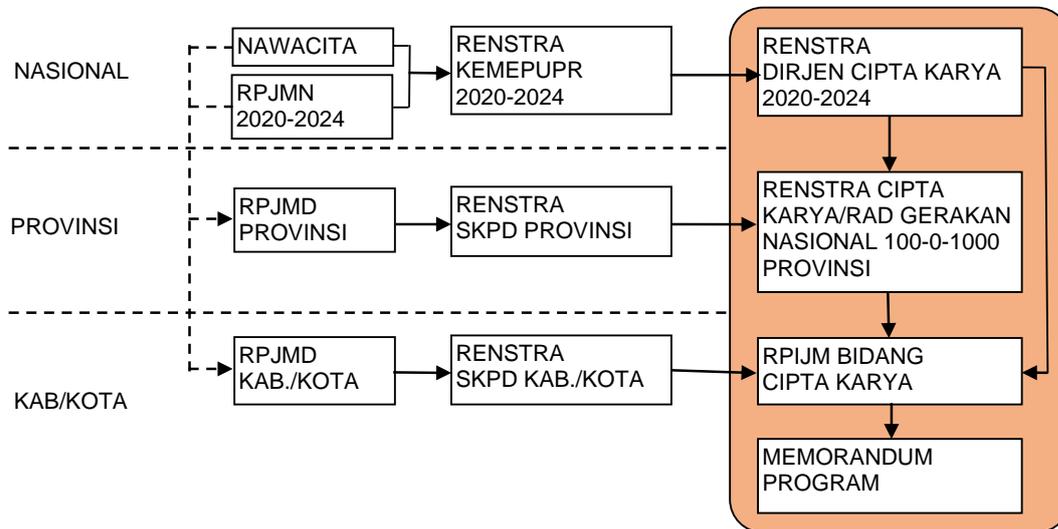
Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur, maka diperlukan dokumen perencanaan terpadu yang baik dengan mengacu pada arahan kebijakan nasional dan memperhatikan potensi serta masalah di daerah. Dokumen Rencana Terpadu dan Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/Kota Bidang Cipta Karya merupakan dokumen perencanaan yang penting dalam pembangunan Bidang Cipta Karya, yang menjadi dasar dalam penyusunan program dan anggaran agar dapat mendorong proses pemerataan pembangunan infrastruktur PU/Cipta Karya yang lebih ideal, efektif dan efisien. Dokumen RPIJM memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan infrastruktur karena diharapkan memiliki kemampuan dalam mendukung pembangunan permukiman, prasarana, dan sarana pekerjaan umum yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (i) memerlukan mobilisasi sumber pembiayaan yang besar; (ii) memerlukan persiapan dan perencanaan teknis yang matang; (iii) memerlukan pematapan program dan penganggaran; dan (iv) memerlukan manajemen pelaksanaan yang menjamin tercapainya tujuan, sasaran, dan manfaat secara efisien serta pemanfaatan sumber daya.

Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) merupakan dokumen perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan dunia usaha dengan mengacu pada rencana pembangunan, rencana tata ruang dan rencana Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) [1]. RPIJM ini disusun dalam rangka menjalankan ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [2], Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 [3], Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 [4]. Adapun kedudukan kegiatan RPIJM secara struktural dapat dilihat pada Gambar 1. Pada skema tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan RPIJM sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk diusulkan kepada pemerintah provinsi sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan, usulan dana APBN/APBD, evaluasi penentuan pendanaan skema hibah, dan lain-lain [5].

Jumlah penduduk di Kabupaten Jember pada tahun 2020 adalah 2.536.729 jiwa yang terdiri dari 1.264.968 laki-laki dan 1.271.761 perempuan. Sedangkan prosentase penduduk miskin tahun 2013 s.d 2020 di Kabupaten Jember masih relatif tinggi 9.25% - 11.68% [6]. Populasi ini juga berdampak pada penyediaan rumah tinggal yang setiap tahunnya mengalami kekurangan (backlog). Karakteristik kawasan permukiman yang sudah ada saat ini di Kabupaten Jember memiliki beberapa masalah sebagai berikut:

- Pergeseran fungsi permukiman menjadi fungsi komersial pada lokasi strategis di perkotaan seringkali mengganggu tata bangunan serta tata lingkungan sekitar
- Keberadaan fasilitas dan utilitas permukiman yang tidak seimbang antara perkotaan dan pedesaan

- Pergeseran lahan pertanian/subur untuk kawasan permukiman di lokasi-lokasi pinggiran kota (hinterland) tidak seimbang dengan perkembangan perluasan lahan pertanian, yang pada akhirnya akan dapat mengganggu program swasembada pangan.
- Perkembangan kawasan permukiman yang cepat tanpa perencanaan kawasan yang komperhensif cenderung menciptakan kawasan permukiman yang kumuh



Gambar 1. Kedudukan dokumen RPIJM dalam dokumen RPJM [1]

Infrastruktur secara umum merupakan seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan misalnya bangunan, pasokan listrik, jalan, air bersih, drainase, penanganan sampah dan lain-lain. Beberapa infrastruktur yang terkait dengan PU Cipta Karya di Kabupaten Jember memiliki beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti. Kondisi infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kabupaten Jember diperoleh dari sumur, baik sumur gali maupun sumur pompa, jaringan pipa air dari PDAM. Dari kebutuhan air bersih di Kabupaten Jember masih banyak yang memanfaatkan air sumur daripada air PDAM.

Layanan PDAM masih berkisar 9.33 – 16.42%. Hal ini disebabkan karena jaringan pipa PDAM belum dapat menjangkau wilayah Kabupaten Jember. Sedangkan infrastruktur saluran drainase di Kabupaten Jember terdiri dari saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier atau saluran-saluran pada pemukiman. Untuk saluran sekunder yang terdapat di Kabupaten Jember dapat dibedakan menjadi dua, yaitu saluran terbuka dan tertutup. Untuk saluran sekunder, baik yang terbuka maupun tertutup serta saluran tersier atau saluran-saluran yang ada pada pemukiman penduduk, banyak yang kondisinya kurang layak. Pemerintah Kabupaten Jember telah berusaha mengatasi hal tersebut dengan cara memperbesar saluran drainase yang sudah ada. Untuk infrastruktur penanganan persampahan di Kabupaten Jember dilaksanakan dengan: (i) Sistem individual dan komunal yang sudah dilayani oleh sistem pengelolaan sampah umum: pengumpulan s.d pembuangan akhir dibantu dinas terkait; dan (ii) secara konvensional: sampah ditangani dengan cara dibakar atau ditimbun oleh warga yang belum terlayani oleh petugas kebersihan. Pola penanganan persampahan ke depan di Kabupaten Jember perlu diubah mengingat jumlah produksi sampah yang semakin meningkat serta perlu adanya suatu organisasi serta partisipasi masyarakat atau badan-badan pemerintah yang menangani masalah sampah.

Berdasarkan permasalahan di atas dan kondisi Kabupaten Jember yang saat ini merupakan salah satu kota yang sedang berkembang seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan regional wilayah sekitar Jember serta rancangan pendukung pembangunan secara nasional, maka aspek pengadaan dan pembangunan infrastruktur harus dikelola dengan

baik. Infrastruktur harus direncanakan dan dikelola secara efektif dan efisien sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Namun dengan adanya keterbatasan anggaran yang tidak seimbang dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur diperlukan Rancangan Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) yang benar-benar sesuai dengan tingkat prioritas utama dan berpotensi memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan.

METODE PENELITIAN

Arahan Kebijakan dan Rencana Strategis Infrastruktur

Pada penyusunan RPIJM harus melakukan peninjauan terhadap arah kebijakan pembangunan secara hirarki mulai dari pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Arahan Pembangunan Bidang Cipta Karya dan Arahan Penataan Ruang [1], antara lain:

- a. Arahan pembangunan bidang cipta karya yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya (RENSTRA) Tahun 2020-2024
- b. Arahan Penataan Ruang mengacu pada:
 - Rencana tata ruang wilayah nasional meliputi: Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) pada Kabupaten dan Kota;
 - Rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi: visi, misi dan tujuan, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana Kawasan strategis
 - Rencana tata ruang wilayah kabupaten Jember meliputi: visi, misi dan tujuan, rencana struktur ruang Kabupaten Jember, rencana pola ruang Kabupaten Jember, dan rencana Kawasan strategis Kabupaten Jember
- c. Arahan Rencana Pembangunan Daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Dan Kabupaten Jember.

Analisis Kondisi Eksisting Wilayah

Sebelum dilakukan penyusunan RPIJM harus dilakukan analisis kondisi eksisting wilayah kabupaten/kota untuk melihat permasalahan utama dan rekomendasi yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Adapun analisis yang diperlukan meliputi:

- a. Analisis sosial
- b. Analisis ekonomi
- c. Analisis lingkungan

Rancangan Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya Kabupaten

Untuk menyusun rancangan pembangunan infrastruktur keciptakarya kabupaten/kota diperlukan beberapa kerangka pendukung pembangunan infrastruktur tersebut meliputi:

- a. Analisis kerangka strategi pembiayaan infrastruktur
- b. Analisis kerangka kelembagaan dan regulasi kabupaten/kota
- c. Analisis rencana pembangunan infrastruktur keciptakarya kabupaten/kota

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan didiskusikan hasil analisis analisis sosial, ekonomi dan lingkungan, yang selanjutnya akan dijadikan penyusunan kerangka strategi pembiayaan infrastruktur, kerangka kelembagaan dan regulasi, dan rencana pembangunan infrastruktur cipta karya kabupaten. Hasil rekomendasi pada RPIJM adalah berupa memorandum program jangka menengah bidang cipta karya kabupaten/kota.

Analisis Sosial, Ekonomi dan Lingkungan

Dalam penyusunan rencana pembangunan infrastruktur diharuskan mengidentifikasi analisis sosial, ekonomi dan lingkungan, agar dapat dimasukkan menjadi isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jember. Isu-isu pembangunan berkelanjutan ini diambil dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember yang telah disusun oleh

Pemerintah Kabupaten Jember. Adapun hasil identifikasi isu tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kondisi Eksisting Sosial

No	Pengelompokan Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan Bidang Cipta Karya	Penjelasan Singkat
(1)	(2)	(3)
1 Sosial		
1.	Meningkatnya laju jumlah penduduk miskin akibat keterbatasan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kesempatan berusaha	Pada taraf perencanaan, pembangunan infrastruktur permukiman seharusnya menyentuh aspek-aspek sosial yang terkait dan sesuai dengan isu-isu yang marak saat ini, seperti pengentasan kemiskinan serta pengarus utamaan gender
2.	Tuntutan peningkatan kebutuhan derajat kesehatan masyarakat membutuhkan sarana dan prasarana serta sistem dan prosedur layanan kesehatan	Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Jember perlu mendapat perhatian serius, yang dititik beratkan pada usaha mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
2 Ekonomi		
1.	Penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta perubahan jenis ketersediaan lapangan pekerjaan	Penyediaan lapangan pekerjaan saat ini semakin tidak seimbang dengan jumlah angka pencari pekerjaan, disisi lain jenis bidang pekerjaan juga mengalami pergeseran. Hal ini akan berdampak pada ekonomi masyarakat.
2.	Perkembangan ekonomi lokal merubah tidak hanya sektor produksi tetapi juga ke arah jasa dan industri, sehingga menuntut semua pelaku usaha semakin profesional.	Perubahan sektor ekonomi membutuhkan keterampilan tenaga kerja yang berubah juga, sedangkan di sisi penyiapan infrastruktur juga akan berubah.
3 Lingkungan		
1.	Peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur layanan kepada masyarakat	Kebutuhan infrastruktur semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.
2.	Kerawanan kerusakan lingkungan oleh meningkatnya kegiatan masyarakat	Dampak terhadap aktivitas masyarakat dalam beraktivitas dapat meningkatkan kerawanan kerusakan lingkungan.
3.	Dampak kawasan kumuh terhadap kualitas lingkungan	Perbaikan infrastruktur sangat diperlukan dalam penanganan kampung.
4.	Globalisasi dan kemajuan teknologi menuntut adanya penyempurnaan dalam pembangunan pos dan informatika	Pembangunan infrastruktur akan sangat dipengaruhi oleh teknologi dan informasi yang berkembang sesuai isu pembangunan masing-masing daerah

Dari isu-isu pembangunan berkelanjutan tersebut, dilakukan analisis dengan mengacu pada peraturan perundangan, kondisi eksisting di masyarakat, serta instrumen. Analisis ini menghasilkan beberapa rekomendasi penyelesaian sebagai berikut:

- a. Rekomendasi Analisis Sosial:
 - Program perlindungan sosial yang ditempuh melalui perluasan akses sosial khususnya pada masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesempatan berusaha, penyediaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman
 - Pendekatan disesuaikan dengan penyebab masalah sosial tersebut: individual keluarga, subkultural, agensi maupun struktural. Juga ukuran kemiskinan, apakah bersifat miskin absolut, relatif atau kultural. Hal ini diperlukan ketersediaan data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran.
 - Diperlukan peningkatan layanan kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat, sehingga pembangunan di semua sektor dapat meningkat, merata dan optimal di seluruh lapisan masyarakat
- b. Rekomendasi Analisis Ekonomi:

- Pemilihan strategi positioning usaha industri berbasis daerah, dalam melakukan reindustrialisasi maka Pemerintah Kabupaten Jember perlu menyederhanakan perizinan serta harmonisasi tarif juga harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing industri
 - Perlu adanya regulasi atau aturan yang akan mempermudah akses pembiayaan baik dari lembaga keuangan bank maupun bukan bank perusahaan negara (BUMN), swasta, dan UMKM maupun koperasi, sehingga dapat dikembangkan beberapa sektor usaha berkelanjutan (*sustainable*).
 - Diharapkan ke depan masyarakat Kabupaten Jember sudah harus bisa mengarah ke usaha yang lebih kontinu dari yang hanya bersifat sementara akibat menurunnya bahan baku misalnya sektor pertambangan dan penggalian ke sektor yang lainnya
- c. Rekomendasi Analisis Lingkungan: pelaksanaan pembangunan bidang Cipta Karya secara lokasi, besaran kegiatan, dan durasi berdampak terhadap masyarakat. Untuk meminimalisir terjadinya konflik dengan masyarakat penerima dampak maka perlu dilakukan beberapa langkah antisipasi yaitu [7]:
- Konsultasi masyarakat: untuk memberikan informasi kepada masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang mungkin terkena dampak akibat pembangunan bidang cipta karya di wilayahnya.
 - Pengadaan lahan dan pemberian kompensasi untuk tanah dan bangunan
 - Permukiman kembali penduduk (*resettlement*) dilaksanakan sedemikian rupa sehingga penduduk yang terpindahkan mendapat peluang ikut menikmati manfaat proyek

Kerangka Strategi Pembiayaan Infrastruktur Bidang Cipta Karya

Untuk mendukung pembangunan infrastruktur jangka menengah, diperlukan strategi pembiayaan yang tepat baik bersumber dari APBD, APBN maupun bersumber dari alternatif pendanaan lainnya. Pada analisis ini diperlukan data besaran anggaran realisasi dan proyeksinya di Kabupaten Jember berdasarkan sektor keciptakaryaan. Data ini dipergunakan untuk menyelaraskan kegiatan pembiayaan yang sudah dilakukan maupun untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur ke depan. Laporan data pembiayaan yang dilakukan melalui APBD sudah lengkap dan dapat dipergunakan untuk memperkirakan pembiayaan pembangunan lanjutan. Namun data realisasi pendanaan pembangunan infrastruktur cipta karya melalui anggaran APBN Direktorat Jenderal Cipta Karya di Kabupaten Jember masih belum tercatat dengan detail, sehingga pada laporan RPIJM belum dapat disampaikan sejauh mana potensi pembangunan infrastruktur yang dapat didanai APBN. Selain itu perlu adanya sinkronisasi program dengan kegiatan di pemerintah pusat agar dapat mengikuti program hibah yang diluncurkan. Oleh karena itu perlu direkomendasikan:

- Perlu disusun laporan khusus yang menyangkut penggunaan APBN di Kabupaten Jember, sehingga dapat dijadikan referensi dan *best practice* untuk penganggaran di tahun-tahun berikutnya
- Perlu membuat program dengan memperhatikan hibah/program-program yang sesuai dengan program Dirjen Cipta Karya agar dapat mengikuti pendanaan yang lebih besar
- Perlu pendanaan berbasis inovatif dan kreatif yaitu mencari sumber pendanaan alternatif dari partisipasi masyarakat dan badan usaha serta pemilihan jenis infrastruktur yang berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi.

Potensi alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur cipta karya di luar APBN dan APBD, antara lain melalui KPS atau KPBU, CSR, dan sebagainya. Untuk kegiatan yang layak secara finansial dapat dibangun dengan skema KPS atau KPBU, sedangkan kegiatan yang tidak layak secara finansial dapat diusulkan kepada swasta sebagai CSR. Beberapa program CSR berupa: (i) kegiatan pelestarian lingkungan yaitu program ramah lingkungan, pengurangan pemakaian energi listrik, konservasi energi, penghematan air, penghijauan, peremajaan pohon dan sebagainya; (ii) pengembangan SDM masyarakat melalui: pelatihan budidaya perikanan, pelatihan jahit menjahit dan lain-lain; (iii) pendidikan: penyediaan fasilitas sekolah dasar, memberikan beasiswa dan sebagainya; (iv) bidang infrastruktur: bantuan perbaikan jalan, irigasi, rumah ibadah; dan (v) bidang kesehatan: bantuan fasilitas ambulance dan lain-lain.

Alternatif Sumber Pendanaan berupa program KPBU yaitu: penyediaan infrastruktur dalam rangka mempercepat ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan perekonomian, mensejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing Bangsa Indonesia dalam persaingan global.

Strategi peningkatan investasi cipta karya adalah sebagai berikut:

- Peningkatan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) oleh Kabupaten Jember dan Provinsi Jawa Timur khususnya dalam rangka peningkatan sharing pendanaan dari APBN
- Peningkatan Penerimaan Daerah dan Efisiensi Penggunaan Anggaran
- Peningkatan kinerja keuangan perusahaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jember
- Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan bidang cipta karya (PPP, KPBU, CSR dan lain-lain)
- Pendanaan untuk operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur yang sudah ada
- Pengembangan infrastruktur skala regional

Dalam pelaksanaan pendanaan pembangunan infrastruktur melalui KSBU di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 2015. Untuk mendukung pelaksanaan KSBU telah disusun regulasi panduan program pendanaan KSBU melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur [8]. Program KSBU sudah diterapkan pada beberapa pembiayaan pembangunan infrastruktur [9], [10]. Pembahasan aspek legalitas KSBU juga sudah diteliti sebagai bahan rujukan penerapan program KPBU yaitu tingkat urgensi pembentukan peraturan daerah tentang kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur [11] serta resiko yang akan dihadapi dalam KPBU [12].

Kerangka Kelembagaan dan Regulasi Kabupaten Jember

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka OPD pada Pemerintah Kabupaten Jember dilakukan analisis secara internal pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya yang meliputi kinerja layanan 5 (lima) tahun sebelumnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas PU Cipta karya, sumber daya yang diperlukan berupa sumber daya manusia dan aset, serta adanya peluang dan tantangan Dinas pada periode 5 (lima) tahun ke depan [13].

Hasil studi menyusun rekomendasi kinerja PU Cipta Karya sebagai berikut:

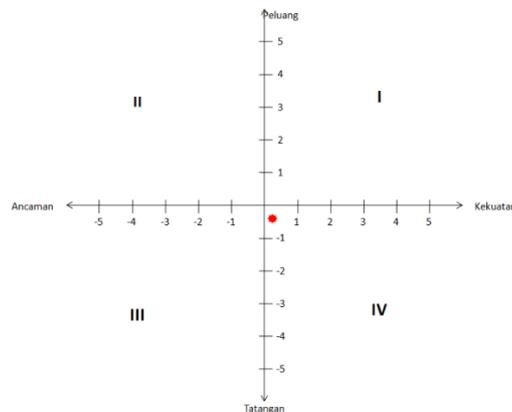
- Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui hubungan kerja antar perangkat daerah dengan menumbuh kembangkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja lembaga
- Perlu mengembangkan hubungan fungsional sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang untuk masing-masing bidang/seksi
- Perlu Perda tentang keorganisasian pemerintah daerah khususnya memperjelas tupoksi masing-masing instansi

Penentuan strategi organisasi PU Cipta Karya dapat dilakukan menggunakan analisis sebagai berikut:

- Pemetaan potensi dan permasalahan organisasi
- Analisis keanggotaan organisasi
- Analisis ketatalaksanaan organisasi
- Analisis SDM

Analisis yang digunakan adalah analisis SWOT untuk memperoleh strategi organisasi dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal dan peluang dan ancaman sebagai faktor eksternal. Dengan menggabungkan hasil penilaian pada faktor internal (IFAS) dan faktor eksternal (EFAS) diperoleh nilai gabungan yang menunjukkan posisi kuadran kelembagaan. Hasil analisis SWOT dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

Berdasarkan Gambar 2 dan hasil perhitungan IFAS – EFAS dari hasil SWOT diketahui bahwa kelembagaan cipta karya berada di Kuadran IV artinya: Organisasi PU Cipta Karya memiliki ancaman yang harus diminimalisir untuk meningkatkan kekuatan yang dimiliki.



Gambar 2 Ploting Kuadran Perhitungan IFAS – EFAS dari hasil SWOT

Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya Kabupaten

Berdasarkan hasil studi dan rekomendasi di atas, pada pembahasan ini akan dilakukan pemetaan kondisi eksisting setiap sektor, penetapan sasaran program, dan usulan program. Hasil analisis akan dibuat dalam bentuk matriks usulan kebutuhan pembiayaan pada setiap sektor pengembangan. Adapun pembahasan pada bagian ini terdiri atas 4 sektor yaitu: (i) sektor Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP); (ii) sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL); (iii) Sektor Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan (iv) sektor pengembangan penyehatan lingkungan permukiman (PLP).

Pada usulan kebutuhan pembiayaan setiap sektor dilakukan pemetaan program yang terdiri dari: nama usulan program, indikator output kegiatan, lokasi pembangunan, rencana tahun pelaksanaan, volume dan satuan kegiatan yang diusulkan, sumber pendanaan yang direncanakan (meliputi: APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, KPS, CSR, dll), dan readiness criteria program (terdiri dari: DED/FS, AMDAL/UKL-UPL, Ketersediaan Lahan, Pengelola Kegiatan, dll). Semakin lengkap data yang diisikan maka program tersebut semakin mudah untuk dilaksanakan, namun perlu diingat bahwa RPIJM ini bersifat sangat dinamis dan berkembang sesuai kebutuhan dan kejadian yang ada di lapangan. Oleh karena itu penyusunan usulan program ini sewaktu-waktu dapat berubah jika ada kondisi yang mendesak. Hal ini sudah terjadi beberapa kali di Indonesia yaitu penyesuaian akibat penerimaan pemerintah dan kegagalan pemerintah dalam penyediaan pendanaan, adanya kegiatan refocusing akibat penanganan dampak pandemi covid-19, adanya bencana yang diluar prediksi sebelumnya, dan lain-lain.

Memorandum Program Jangka Menengah Bidang Cipta Karya

Sebagai rekomendasi akhir dari studi penyusunan RPIJM adalah penyusunan Memorandum Program Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota. Memorandum tersebut merupakan sebuah ringkasan rencana program dan investasi bidang cipta karya. Rencana ini harus menjabarkan skenario pengembangan kabupaten dan pengembangan sektor bidang cipta karya, usulan kebutuhan investasi yang disusun dengan berbasis kebutuhan, target pencapaian sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, mekanisme pendanaan atau pembiayaan, skala prioritas penanganan, dan rencana pelaksanaan program investasi. Memorandum program ini dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menjalan pembangunan infrastruktur bidang cipta karya dengan pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, badan usaha/swasta, masyarakat, bantuan pihak lain/sponsor, dan lain-lain.

KESIMPULAN

Penyusunan RPIJM harus dilakukan secara *prudent* karena menyangkut anggaran yang besar, program kegiatan yang sangat esensial bagi masyarakat baik dalam penyelesaian masalah maupun pengembangan wilayah yang berkelanjutan, memiliki misi untuk mensinkronisasi pembangunan infrastruktur pemerintah daerah maupun pusat, dan memiliki risiko kegagalan pada manajemen pelaksanaannya. Oleh karena itu pada penyusunan RPIJM diperlukan analisis mendalam tentang kondisi wilayah (analisis sosial, ekonomi, dan lingkungan) untuk melihat permasalahan yang terjadi dan harus diselesaikan, analisis kerangka strategi pembiayaan infrastruktur, analisis kelembagaan dan regulasi, dan rencana usulan kebutuhan pembiayaan infrastruktur agar tepat, efisien dan efektif. Hasil rancangan RPIJM disusun dalam bentuk rencana usulan kebutuhan pembiayaan sektor pengembangan cipta karya yang meliputi: (i) Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP); (ii) Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL); (iii) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan (iv) pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP). Rekomendasi hasil RPIJM disusun dalam bentuk Memorandum Program Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota yang menjabarkan skenario pengembangan kabupaten dan pengembangan sektor bidang Cipta Karya, usulan kebutuhan investasi yang disusun dengan berbasis kebutuhan, target pencapaian sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, mekanisme pendanaan atau pembiayaan, skala prioritas penanganan, dan rencana pelaksanaan program investasi.

ACKNOWLEDGMENT

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada LP2M Universitas Jember dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Jember yang telah memfasilitasi kontrak kerja sama penelitian ini sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- [1] -, "Pedoman Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota," Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya, Jakarta, 2014.
- [2] -, *Undang Undang No 23 Tahun 2014*, Jakarta: Pemerintah RI, 2014.
- [3] -, *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*, Jakarta: Pemerintah RI, 2020.
- [4] -, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024*, Jakarta: Pemerintah RI, 2020.
- [5] M. Patiung, "Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten SAm pang," *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, vol. 15, no. 2, pp. 17-38, 2015.
- [6] -, *Kabupaten Jember dalam Angka*, Jakarta: BPS Kabupaten Jember, 2021.
- [7] B. Widodo, L. Ribut and W. Donan, "KLHS untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan," *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, vol. 4, no. 1, pp. 43-54, 2012.
- [8] -, *Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBUs) dalam Penyediaan Infrastruktur*, Jakarta: Pemerintah RI, 2015.
- [9] A. Wibowo, "Perkembangan Terkini dalam Pembiayaan Infrastruktur yang Melibatkan Partisipasi Badan Usaha," in *Konferensi Nasional Teknik Sipil 10 Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 26-27 Oktober 2016*, Yogyakarta, 2016.
- [10] A. A. Larasanti, J. E. Sitorus, M. B. W. Asad and A. Firmana, "Tinjauan Potensi Teknis dan Kelayakan EKonomi PLTA Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Bendungan Merangin," *Jurnal Sumber Daya Air*, vol. 17, no. 2, pp. 95-110, 2021.
- [11] W. A. Mudiparwanto and A. Gunawan, "Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur," *Diversi Jurnal Hukum*, vol. 8, no. 1, pp. 111-138, 2022.
- [12] M. H. Pangeran, "Model Estimasi Risiko pada Proyek Infrastruktur Skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dengan Pendekatan Fuzzy-Delphi," *Rekayasa Sipil*, vol. 13, no. 2, pp. 79-88, 2019.

- [13] -, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*, Jakarta: Pemerintah RI, 2010.